

BAB III

PERKEMBANGAN DAN PENGELOLAAN UANG BEREDAR DI INDONESIA

Dalam bab kedua telah dibahas mengenai beberapa teori permintaan uang, yakni dari dua aliran yang dikenal sebagai aliran Kuantitas Uang dan Keynes. Dari pembahasan ini, akhirnya diperoleh suatu kesimpulan bahwa teori dari aliran Kuantitas Uang lebih relevan untuk menyusun suatu model permintaan dan kecepatan perputaran uang bagi negara sedang berkembang, khususnya Indonesia. Kemudian, di bagian lain disimpulkan pula bahwa uang beredar akan dipergunakan untuk menaksir permintaan uang.

Untuk menjaga dan memastikan agar uang beredar tersedia dalam jumlah yang diperlukan untuk menciptakan (i) tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan (ii) tingkat harga-harga yang stabil, Pemerintah perlulah mengambil langkah-langkah yang menjaga agar keadaan sektor keuangan dalam kegiatan ekonomi adalah selaras dengan tujuan untuk menciptakan keadaan-keadaan tersebut. Langkah-langkah Pemerintah untuk mengawasi sektor keuangan dinamakan kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan tersebut dijalankan oleh Pemerintah melalui Bank Sentral.¹

Oleh karena itu, bab ini akan berkaitan dengan pembahasan mengenai uang beredar di Indonesia. Uraianya akan berkisar pada perkembangan dan pengelolaannya. Selanjutnya akan dilengkapi pula dengan pembahasan mengenai perkembangan harga-harga dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

¹Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, Bina Grafika, Kuala Lumpur, 1981, hal. 257.

1. Pengelolaan Uang Beredar di Indonesia

Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral bahwa tugas pokok Bank Indonesia (sebagai Bank Sentral) adalah membantu Pemerintah dalam: (a) mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah; dan (b) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Di samping itu, Bank Indonesia mempunyai hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas dan logam. Uang kertas dan logam ini merupakan komponen uang beredar di Indonesia yang didefinisikan dalam arti sempit terdiri atas uang kartal dan giral.

Dalam hal pengelolaannya, uang kartal tidak memerlukan instrumen khusus. Bank Indonesia mempunyai hak mencabut kembali uang yang telah dikeluarkannya serta menariknya dari peredaran. Sedang pengelolaan uang giral memerlukan alat-alat tertentu untuk mengendalikan jumlah peredarannya. Uang giral merupakan "... passiva-passiva bank-bank komersial."² Bank Indonesia adalah bank untuk bank-bank umum, bank pembangunan, bank tabungan dan sebagainya. Bank Indonesia mengharuskan bank-bank tersebut untuk menyimpan cadangan yang untuk selanjutnya disetorkan kepada Bank Sentral. Cadangannya sejumlah persentase tertentu dari jumlah nilai pasiva lancar. Cadangan ini dimaksudkan sebagai cadangan minimum yang harus

²Bruce Glassburner dan A. Chandra, op cit, hal. 99.

disediakan oleh bank-bank itu. Penentuan cadangan minimum ini akan mempengaruhi kemampuan bank-bank komersial untuk menyalurkan kredit kepada para nasabahnya. Apabila ketentuan cadangan minimum diturunkan, jumlah uang beredar cenderung naik, dan sebaliknya kalau dinaikkan jumlah uang akan cenderung turun.

1.1. Peralatan kebijakan moneter Bank Indonesia.

Kebijakan moneter "... adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya Bank Sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat."³ Sedangkan mengenai tujuan kebijakan moneter, terutama untuk stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Salah satu aspek yang penting daripada kebijaksanaan moneter dalam usaha mewujudkan stabilitas ekonomi adalah pengaturan likwiditas perekonomian khususnya pengaturan jumlah uang beredar untuk mengusahakan stabilitas harga-harga sekaligus menunjang kegiatan ekonomi dan pemerataan pendapatan.⁴

Bank Sentral mempunyai beberapa peralatan kebijakan moneter yang dapat dipergunakan untuk pengaturan uang bere-

³Nopirin, op cit, hal. 40.

⁴Departemen Penerangan R.I., Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 16 Agustus 1979, Deppen R.I., Jakarta, 1979, hal. 181-182.

dar. Peralatan kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Sentral dikategorikan menjadi tiga macam, yakni:

... pertama instrumen yang umum, meliputi politik pasar terbuka (open market), politik cadangan minimum (reserve requirement) dan politik diskonto (discount policy); kedua instrumen yang selektif, meliputi margin requirement, pembatasan/penentuan tingkat bunga, yang kesemuanya ini untuk mempengaruhi alokasi kredit untuk sektor-sektor ekonomi tertentu; dan ketiga: adalah instrument yang sering disebut dengan "moral suasion" atau "open mouth policy". Di samping itu, penentuan tingkat bunga, pengaturan sistem perbankan serta devaluasi termasuk juga dalam instrument kebijaksanaan moneter.⁵

Sementara itu, Sadono Sukirno membedakan dua macam kebijakan moneter, yakni bersifat kuantitatif dan kualitatif. Tiga kebijakan pertama yang dikatakan sebagai instrumen yang umum oleh Nopirin -- yakni politik pasar terbuka, politik cadangan minimum dan politik diskonto -- menurut Sadono Sukirno dikategorikan sebagai kebijakan moneter kuantitatif. "Yang dimaksud dengan kebijaksanaan moneter yang bersifat kuantitatif adalah kebijaksanaan moneter yang terutama bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian."⁶

"Kebijaksanaan keuangan yang bersifat kualitatif adalah kebijaksanaan yang terutama bertujuan untuk mempengaruhi dan mengawasi bentuk dan corak peminjaman-peminjaman dan investasi-investasi yang dilakukan oleh berbagai bank umum."⁷ Bila dibandingkan dengan pembagian yang dilakukan oleh Nopi-

⁵Nopirin, loc cit.

⁶Sadono Sukirno, op cit., hal. 261.

⁷Ibid, hal 261-262.

rin, maka kebijakan moneter yang bersifat kualitatif tersebut -- sebagaimana dinyatakan oleh Sadomo Sukirno -- meliputi pembagian yang kedua dan ketiga (instrumen selektif dan moral suasion). Uraian secara lengkap mengenai macam-macam instrumen kebijakan moneter tersebut adalah sebagai berikut:

a. Politik pasar terbuka.

Politik ini merupakan tindakan Bank Sentral untuk membeli dan menjual surat-surat berharga. Pembelian surat-surat berharga oleh Bank Sentral akan menambah cadangan bank-bank umum. Karena bertambahnya cadangan itu -- dengan melalui proses penciptaan kredit -- bank-bank umum dapat menambah jumlah uang beredar. Hal sebaliknya akan terjadi apabila Bank Sentral melakukan penjualan surat-surat berharga.

b. Politik diskonto.

Politik ini merupakan tindakan Bank Sentral untuk mengubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum bila bank-bank itu meminjam dana dari Bank Sentral. Kenaikan diskonto akan mengakibatkan naiknya biaya untuk meminjam dana dari Bank Sentral. Sehingga, hal ini akan mempunyai akibat berkurangnya minat bank-bank umum untuk meminjam dana. Dengan perkataan lain, bahwa cadangan yang berada dalam bank-bank umum tidak akan bertambah. Kemampuan untuk memberikan kredit juga tidak akan bertambah. Sehingga pertambahan uang beredar dapat ditekan.

c. Politik perubahan cadangan minimum.

Politik ini merupakan tindakan Bank Sentral untuk menentukan jumlah nilai cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank-bank umum. Seperti telah disebutkan pada nomor (a), nilai cadangan ini akan berpengaruh -- melalui proses penciptaan kredit -- pada jumlah uang yang beredar. Dengan perkataan lain, besar nilai cadangan itu akan mempengaruhi kemampuan bank-bank umum untuk menciptakan kredit. Sehingga bila cadangan minimum dinaikkan, kemampuan bank-bank umum untuk menyalurkan kredit akan menurun (jumlah uang beredar cenderung turun), dan demikian pula sebaliknya.

d. Pembatasan/penentuan tingkat bunga.

Alat/instrumen ini dipergunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan pembelian surat-surat berharga. Hal ini dilakukan dengan cara menentukan jumlah minimum kas sebagai uang muka. Kemudian sisanya, yakni selisih antara nilai transaksi dengan uangmuka tersebut, dapat meminjam pada Bank Sentral.

e. Moral suasion

Tindakan ini dilakukan dengan cara melalui pidato-pidato Gubernur Bank Sentral atau publikasi-publikasi lainnya. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap lembaga-lembaga moneter atau individu-individu yang bergerak di bidang moneter, yakni agar bersikap seperti yang dikehendaki oleh penguasa moneter. Dengan demikian, moral suasion (bujuk-sasaran moral)-pun dapat dipergunakan sebagai alat kebijakan.

1.2. Pengelolaan uang beredar di Indonesia.

Seperti telah disinggung di muka, kebijakan moneter merupakan tindakan oleh penguasa moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar termasuk kredit, yang selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan melihat pengalaman-pengalaman di masa lalu, terutama pada periode tahun 60-an, kebijakan moneter sangat diperlukan dalam rangka stabilisasi ekonomi. Dengan lain perkataan, uang beredar perlu dikelola. Maksudnya, bahwa besar kecilnya jumlah uang yang beredar harus dikendalikan guna mencapai stabilitas ekonomi. Agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai perlunya pengelolaan/pengendalian jumlah uang yang beredar, kiranya perlu untuk melihat pengalaman di masa lampau.

Dari Tabel 1 dapat dilihat ciri yang menonjol dalam kebijakan moneter di Indonesia (khususnya pada periode tahun enampuluhan), yakni laju penciptaan uang yang cepat. Akibat yang paling jelas dari kebijakan ini adalah laju inflasi tidak dapat dikendalikan. Namun, dengan berhasil dikendalikannya laju penciptaan uang baru, maka laju inflasi -- sebagaimana terlihat dalam tabel -- berangsur-angsur menurun.

"Program stabilisasi ekonomi ditunjang pula melalui pelaksanaan kebijaksanaan pengalihan dana perkreditan bank, mengingat fungsi dana perkreditan adalah untuk mengurangi perluasan kredit terhadap perkembangan harga."⁸ (posisi dana

⁸Departemen Penerangan R.I., op cit, hal. 170.

TABEL 1
UANG BEREDAR DAN TINGKAT HARGA
1960-1978 (dalam persen)

Tahun	Kenaikan jumlah uang beredar	Kenaikan harga
1960	39	29 ✓
1961	42	72 ✓
1962	99	158
1963	95	128
1964	156	135
1965	280	595
1966	763	636
1967	132	112
1968	120	85
1969	61	10
1970	36	9
1971	28	2
1972	48	26
1973	41	27
1974	40	33
1975	33	20
1976	28	14
1977	25	12
1978	24	7

Sumber: Anne Booth dan Peter McCawley (ed), Ekonomi Orde Baru, Cetakan Kedua, terjemahan Boediono, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 142.

perkreditan ini dapat dilihat pada Lampiran 1 Tabel 1). Seperti terlihat dalam tabel tersebut, dana perkreditan adalah meliputi Giro, Deposito dan Tabanas/Taska yang berada dalam Bank Umum Pemerintah dan Bank Swasta Nasional maupun Asing.

"Giro, deposito dan tabungan (Tabanas dan Taska) merupakan pengalihan dana pembiayaan dan investasi dalam negeri yang dilakukan dan berasal dari sektor keuangan dan perbankan."⁹ Posisi giro, pada mulanya, lebih dominan sebagai dana perkreditan. Namun menginjak tahun 1984, posisinya diimbangi oleh deposito berjangka. Ini menunjukkan keberhasilan pihak perbankan dalam menarik dana dari masyarakat. Faktor pemunjangnya adalah kebijakan deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang memberi kebebasan pihak perbankan untuk menentukan tingkat bunga depositonya masing-masing. "Hanya dengan memberikan imbalan bunga yang cukup tinggi, mobilisasi dana lewat deposito bisa dilakukan"¹⁰

2. Jumlah Uang Beredar dan Harga-harga di Indonesia

2.1. Jumlah uang beredar di Indonesia.

Uang yang beredar di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah memberi kekuasaan kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang yang diperlukan dalam rangka memperlancar kegiatan perdagangan dan produksi.

Sejalan dengan makin meningkatnya, baik kegiatan ekonomi maupun pembangunan, maka uang yang di dalam aktivitas

⁹ Soetatwo Hadiwigeno dan Faried Wijaya, Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Cetakan Kedua, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1982, hal. 272.

¹⁰ Tempo, nomor 34 Tahun XVI, 18 Oktober 1986, hal. 55.

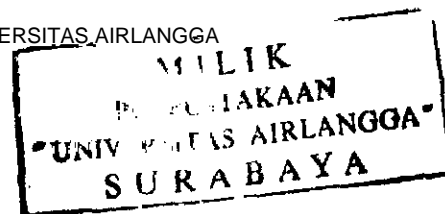
tersebut -- sesuai dengan salah satu fungsi uang -- berfungsi sebagai alat transaksi, turut meningkat pula. "Dalam suatu perekonomian yang berkembang nilai transaksi yang dilakukan masyarakat bertambah besar. Ini berarti dalam suatu perekonomian yang berkembang diperlukan lebih banyak uang."¹¹

Dilihat dari komposisinya, dari tahun ke tahun, peranan uang giral menjadi lebih besar dibandingkan dengan uang kartal (lihat Tabel 2). "Perkembangan uang giral yang semakin cepat tersebut adalah sejalan dengan peningkatan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat dan semakin berkembangnya dunia usaha."¹²

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa dalam perekonomian yang berkembang, nilai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat akan bertambah besar. Demikian pula halnya dengan perekonomian Indonesia yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Bruto yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus menentukan pertambahan jumlah uang beredar dari tahun ke tahun. Ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang mengenai Bank Sentral, bahwa "Sebelum permulaan tahun anggaran, pemerintah menentukan jumlah maksimum uang yang ... akan beredar pada tahun yang bersangkutan dan mencantumkan-

¹¹ Sadono Sukirno, op cit, hal 262.

¹² Departemen Penerangan R.I., op cit, hal. 184.



nya dalam Nota Keuangan."¹³

TABEL 3
PERKIRAAN JUMLAH UANG BEREDAR
1976/1977 - 1987/1988
(dalam milyar Rp)

Tahun *)	Jumlah uang beredar
1976/1977	1.819,0
1977/1978	2.219,2
1978/1979	2.799,9
1979/1980	3.505,5
1980/1981	4.441,5
1981/1982	6.776,8
1982/1983	8.302,0
1983/1984	8.992,0
1984/1985	9.503,0
1985/1986	10.164,0
1986/1987	11.303,0
1987/1988	14.212,0

Sumber: Republik Indonesia, Nota Keuangan & Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dari Tahun Anggaran 1976/1977 s/d 1987/1988.

*) Tahun Anggaran: mulai April s/d Maret.

2.2. Perkembangan harga di Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui, pengukuran laju inflasi di Indonesia pada mulanya didasarkan atas Indeks Biaya Hidup (IBH) di Jakarta yang mencakup 62 macam barang dan jasa, te-

¹³ Lihat UU no. 13 th. 1968, Pasal 26 ayat 3.

TABEL 2
 JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA,
 1979:I - 1985:IV (dalam milyar Rp)

Tahun	Kartal	Posisi (%)	Giral	Posisi (%)	Jumlah
1979:I	1.369	49	1.431	51	2.800
II	1.493	49	1.512	51	3.005
III	1.480	47	1.680	53	3.160
IV	1.552	46	1.833	54	3.385
1980:I	1.774	48	2.023	52	3.797
II	1.955	47	2.224	53	4.179
III	2.130	45	2.552	55	4.682
IV	2.153	43	2.842	57	4.995
1981:I	2.229	43	2.985	57	5.214
II	2.384	42	3.234	58	5.618
III	2.451	41	3.546	59	5.997
IV	2.557	39	3.929	61	6.486
1982:I	2.541	38	4.234	62	6.775
II	2.643	37	4.528	63	7.177
III	2.826	37	4.767	63	7.593
IV	2.934	41	4.187	59	7.121
1983:I	3.000	41	4.379	59	7.379
II	3.284	44	4.221	56	7.505
III	3.307	43	4.409	57	7.716
IV	3.333	44	4.236	56	7.569
1984:I	3.554	44	4.501	56	8.055
II	4.047	49	4.136	51	8.183
III	3.641	46	4.320	54	7.961
IV	3.712	43	4.869	57	8.581
1985:I	3.785	42	5.203	58	8.988
II	4.276	45	5.152	55	9.428
III	4.268	45	5.146	55	9.414
IV	4.440	44	5.664	56	10.104

Sumber: Bagian Urusan Ekonomi dan Statistik, Laporan Mingguan no. 1403, Bank Indonesia, Jakarta, 1987, hal.12.

tapi sejak Maret 1979 telah digunakan angka indeks baru, yakni Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia. Indeks ini mencakup sejumlah 115-150 jenis barang dan jasa. "Recent work by the Central Bureau of Statistic has produce a new urban consumer price index ... a more up-to-date an representative market basket, and a wider geographic base."¹⁴

Indeks Harga Konsumen Indonesia merupakan gabungan indeks harga di 17 ibukota propinsi di Indonesia. Kota-kota itu meliputi: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Denpasar, Mataram, Kupang, Manado, Ujung Pandang, Ambon dan Jayapura.

Penggunaan angka indeks yang baru ini adalah merupakan suatu upaya untuk mengimbangi adanya perubahan-perubahan selera, tingkat pendapatan, tingkat harga dan sebagainya. Bila dibandingkan dengan angka indeks yang lama, angka indeks yang baru ini lebih mewakili keadaan yang sebenarnya, karena cakupan jenis barang yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas.

Alat ukur tingkat inflasi yang baru tersebut dapat mencerminkan perkembangan harga secara lebih nyata, karena di samping mencakup nilai pengeluaran dan jumlah serta jenis barang dan jasa yang lebih banyak, juga mencakup pola konsumsi semua golongan masyarakat di sejumlah kota besar.¹⁵

¹⁴David O. Dapice, "An Overview of the Indonesian Economy" dalam Gustav F. Papanek, The Indonesian Economy, Praeger, New York, 1980, hal. 30.

¹⁵Republik Indonesia, Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI 16-8-1980, Republik Indonesia, Jakarta, 1980, halaman 209-211.

TABEL 4

INDEKS HARGA KONSUMEN INDONESIA DI 17 IBUKOTA PROPINSI

1979:II-1985:IV (Apr 1978-Mar 1979 = 100)

Tahun	Indeks umum	Perubahan (%)
1979:II	132,27	8,62
III	139,78	5,68
IV	143,07	2,35
1980:I	147,14	2,84
II	156,61	6,44
III	160,78	2,66
IV	167,55	4,21
1981:I	172,14	2,74
II	174,73	1,50
III	177,40	1,53
IV	179,82	1,36
1982:I	189,63	5,46
II	190,49	0,45
III	191,49	0,65
IV	197,85	3,20
1983:I	205,99	4,11
II	216,19	4,95
III	219,61	1,58
IV	221,53	0,87
1984:I	233,42	5,37
II	238,69	2,26
III	238,98	0,12
IV	241,63	1,11
1985:I	242,07	0,18
II	249,46 ^{*)}	3,05
III	250,38	0,37
IV	252,20	0,73

Sumber: Bagian Urusan Ekonomi dan Statistik, Laporan Mingguan no. 1403, Bank Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 74.

*) Rata-rata bulan April, Mei dan Juni.

3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

"Di Indonesia, Perkembangan Produk Domestik Bruto digunakan sebagai dasar pengukuran pertumbuhan ekonomi Indonesia."¹⁶ Selama satu dasawarsa (lihat Tabel 5), pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1980, yakni sebesar 9,9 persen. Pada periode sebelumnya, pertumbuhan itu

TABEL 5
 PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN PERTUMBUHAN
 EKONOMI INDONESIA, 1976 - 1985

Tahun	Produk Domestik Bruto ^a (milyar rupiah)	Pertumbuhan ekonomi ^a (persen)
1976	8.156	6,9
1977	8.882	8,9
1978	9.567	7,7
1979	10.165	6,3
1980	11.169	9,9
1981	12.055	7,9
1982	12.325	2,2
1983	73.698 ^b	4,2
1984	78.214 ^b	6,1 ^b
1985 ^c	79.679 ^b	1,9 ^b

Sumber: Tinjauan Ekonomi Bank Bumi Daya no. 12 th. X Desember 1986, Tabel 1 & 2, hal. 2.

a. Berdasarkan harga konstan 1973.

b. Berdasarkan harga konstan 1983.

c. Angka sementara.

¹⁶ Biro Pusat Statistik, Statistik Indonesia 1985, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1986, hal. 603.

relatif stabil, berkisar antara 6 hingga 8 persen. Pada periode ini, pengaruh adanya resesi dunia belum memasuki Indonesia. "Pengaruhnya mulai dirasakan sejak permulaan semester II tahun 1981."¹⁷ Hal ini dapat dilihat dari tajamnya kemerosotan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1982, yakni hanya sebesar 2,2 persen.

"Memasuki tahun ketiga Pelita IV perekonomian Indonesia masih tetap dihadapkan pada berbagai tantangan berat."¹⁸ Sebagai akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini tidak selaju pada periode sebelum tahun 1982. Bahkan, dengan harga konstan 1973, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1983 hanya 1,9 persen.

Pada umumnya, dalam perhitungan PDB secara riil di negara berkembang, tahun dasar yang dipakai berubah tiap 10 tahun sekali. Itulah sebabnya, mulai tahun 1984, pertumbuhan ekonomi Indonesia dihitung dengan menggunakan harga konstan 1983. Satu dasawarsa setelah 1973 yang telah digunakan sebagai tahun dasar sebelumnya.

¹⁷ Soeharsono Sagir, Ekonomi Indonesia Menghadapi Pelita IV, Alumni, Bandung, 1985, hal. 279.

¹⁸ Suntoro Isman dan Komara Djaja, "APBN 1986/1987 dan Prospek Realisasinya" dalam Moh. Arsjad Anwar dkk. (ed) Ekonomi Indonesia, Masalah dan Prospek 1986/1987, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 63.